



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 April 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I GEDE EKA WIRATNAYA**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN PERENCANAAN**
3. NHK : **868225**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 8.350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1.200 m2/900 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.969.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 289.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA CROSS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000



4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. LAINNYA, - ALAT STERILISATOR PLASMA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 34.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 327.063.033

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.680.063.033

III. HUTANG Rp. 866.250.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.813.813.033

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.